

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kota Batam adalah sebuah kota di provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Kota ini memiliki sejarah yang panjang dan telah berkembang menjadi salah satu kota terpenting di Indonesia. Batam awalnya dikenal sebagai sebuah pulau kecil yang tidak memiliki infrastruktur yang baik, tetapi dengan adanya investasi dan perencanaan yang tepat, kota ini telah berkembang menjadi sebuah kota industri yang maju dan strategis. Batam memiliki posisi strategis yang sangat penting karena berada dekat dengan Singapura dan Malaysia. Dengan letaknya yang strategis, Batam telah menjadi salah satu kota yang paling populer di Indonesia untuk berinvestasi dan melakukan bisnis. Kota ini juga memiliki akses yang mudah ke dua negara tersebut, membuatnya menjadi sebuah lokasi yang sangat penting untuk berbagai industri dan bisnis.

Pertumbuhan ekonomi Kota Batam sangat signifikan dan telah menjadi salah satu kota yang paling maju di Indonesia. Kota ini memiliki sektor-sektor kunci yang berkontribusi pada ekonominya, seperti industri manufaktur, konstruksi, dan perdagangan. Selama periode tahun 2010-2016, kontribusi sektor industri terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kota Batam berada pada kategori sangat baik, dengan nilai produksi sektor industri yang terus

meningkat. Beberapa sektor yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Kota Batam adalah: Industri Manufaktur, Industri manufaktur adalah salah satu sektor yang paling penting di Kota Batam.

Kota ini telah menjadi salah satu kota yang paling maju di Indonesia dalam hal industri manufaktur, dengan berbagai produk yang diproduksi, seperti elektronik, tekstil, dan peralatan rumah tangga. Konstruksi adalah sektor lain yang sangat penting di Kota Batam. Kota ini telah menjadi salah satu kota yang paling populer di Indonesia untuk berinvestasi dalam proyek-proyek konstruksi, seperti pembangunan infrastruktur, rumah dan gedung-gedung, serta perdagangan. Perdagangan adalah sektor yang sangat penting di Kota Batam. Kota ini telah menjadi salah satu kota yang paling populer di Indonesia untuk berinvestasi dalam perdagangan, seperti perdagangan internasional dan domestik.

Zona Perdagangan Bebas (*Free Trade Zone*) di Batam dibentuk untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi Indonesia, terinspirasi oleh keberhasilan Batam sebagai kawasan industri dan investasi. Zona ini memberikan keistimewaan berupa pembebasan pajak dan cukai, menyederhanakan birokrasi, dan meningkatkan daya saing ekspor Indonesia. Selain itu, zona ini juga mendukung pengembangan industri dan bisnis, menciptakan lapangan kerja, serta memiliki struktur organisasi yang melibatkan Dewan Kawasan dan Badan Pengusahaan. Implementasinya termasuk pemangkasan

waktu proses perizinan, pengembangan infrastruktur, dan peningkatan sumber daya manusia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan industri lokal di Batam.

Paradiplomasi adalah fenomena baru dalam hubungan pemerintahan dan internasional, di mana entitas subnasional, khususnya pemerintah daerah, terlibat dalam hubungan luar negeri dalam kerangka kepentingan khusus yang diatur oleh mereka. Konsep ini sangat penting dalam diplomasi modern karena memungkinkan pemerintah daerah untuk berpartisipasi dalam interaksi internasional dan memajukan kepentingan lokalnya (Harakan & Taufik, 2023).

Paradiplomasi penting karena beberapa alasan. Pertama, mendorong pembangunan berkelanjutan dengan mengizinkan pemerintah daerah bermitra dengan perusahaan penanaman modal asing (FDI) dan entitas internasional lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, mendorong inisiatif regional dan interaksi global (Harakan & Taufik, 2023). Kedua, hal ini meningkatkan daya saing ekonomi karena diplomasi daerah menjadi alat penting bagi pemerintah daerah untuk menarik investasi, talenta, dan kemitraan global, sehingga meningkatkan visibilitas internasional dan melakukan intervensi dalam arus hubungan internasional global (Fathun, 2021). Ketiga, hal ini memberikan visibilitas dan prestise internasional kepada pemerintah daerah, memfasilitasi kerjasama teknis dan mendapatkan pengakuan nasional (Milani & Ribeiro, 2011).

Terakhir, hal ini menumbuhkan daya saing daerah dengan memungkinkan pemerintah daerah terlibat dalam kerja sama regional dan memanfaatkan kekuatan dan sumber daya unik mereka (Fathun, 2021).

Paradiplomasi merupakan strategi yang semakin relevan dalam era globalisasi, terutama bagi wilayah-wilayah strategis seperti Kota Batam. Sebagai daerah yang memiliki status sebagai Zona Perdagangan Bebas (*Free Trade Zone*), Batam tidak hanya memainkan peran penting dalam konteks ekonomi domestik, tetapi juga dalam hubungan internasional. Letaknya yang strategis, menjadikan Batam sebagai salah satu wilayah unggulan dalam memanfaatkan paradiplomasi untuk menarik investasi asing, meningkatkan pariwisata, serta memperkuat infrastruktur ekonomi.

Melalui paradiplomasi, pemerintah daerah Kota Batam dapat secara langsung terlibat dalam kerja sama lintas negara untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, penerapan paradiplomasi ini tidak terlepas dari tantangan, seperti keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam hubungan internasional, minimnya sumber daya manusia yang kompeten, serta infrastruktur pendukung yang belum memadai. Hal ini menjadi isu krusial yang perlu diperhatikan, terutama mengingat potensi besar Batam untuk berperan sebagai hub internasional di kawasan Asia Tenggara.

Terlepas dari manfaatnya, paradiplomasi menimbulkan tantangan bagi pemerintah daerah. Hal ini termasuk terbatasnya kewenangan untuk melakukan kerja sama internasional, dimana pemerintah pusat seringkali mendominasi proses legislatif (Surwandono & Maksum, 2020). Selain itu, kendala keuangan, keahlian sumber daya manusia yang tidak memadai, dan infrastruktur teknologi yang tidak memadai dapat menghambat pemanfaatan kekuatan ekonomi secara optimal (Harakan & Taufik, 2023). Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, pemerintah daerah harus mengembangkan kemitraan strategis dengan perusahaan-perusahaan dan terlibat dalam inisiatif regional untuk memfasilitasi interaksi internasional mereka secara efektif.

Dengan memahami tantangan-tantangan ini, pemerintah daerah Batam dapat mengembangkan strategi paradiplomasi yang efektif untuk memaksimalkan potensi ekonomi dan industri lokalnya. Dengan demikian, Batam dapat terus berperan sebagai motor penggerak ekonomi nasional yang berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

Kota Batam dapat menjadi contoh konkret bagaimana pemerintah daerah dapat memanfaatkan paradiplomasi untuk menarik perhatian dunia internasional. Namun, paradiplomasi di Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal kapasitas, koordinasi dengan pemerintah pusat, dan persepsi

masyarakat internasional terhadap kemampuan pemerintah daerah. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana upaya pemerintah daerah dapat efektif dalam membangun citra kota dan menarik investasi, pariwisata, serta meningkatkan infrastruktur ekonomi.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam bagaimana paradiplomasi dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah Kota Batam dalam meningkatkan daya tarik investasi, pariwisata, dan infrastruktur ekonomi di wilayah *Free Trade Zone*. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman teoretis mengenai konsep paradiplomasi tetapi juga menyajikan analisis strategis yang relevan dan aplikatif untuk mengatasi tantangan yang ada. Fokus pada konteks Batam ini diharapkan dapat memperjelas peran paradiplomasi dalam membangun citra kota yang kompetitif di tingkat global.

Minimnya kajian terkait paradiplomasi oleh pemerintah daerah di Indonesia, khususnya pada wilayah *Free Trade Zone* seperti Kota Batam, menjadikan topik ini relevan untuk diteliti. Penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoretis terhadap studi diplomasi dan hubungan internasional, tetapi juga menawarkan wawasan praktis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi diplomasi yang lebih efektif. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi

celah penelitian yang ada serta memberikan panduan strategis bagi pemerintah daerah di era globalisasi yang semakin kompleks.

Penelitian ini mengambil lokasi Batam sebagai Free Trade Zone (FTZ) yang memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam menarik investasi asing dan mendorong pertumbuhan industri berbasis ekspor. Sebagai wilayah dengan kebijakan perdagangan bebas, Batam mendapat berbagai insentif fiskal dan regulasi khusus yang membedakannya dari daerah lain di Indonesia. Selain itu, letaknya yang berdekatan dengan Singapura dan Malaysia menjadikannya pusat potensial dalam jaringan perdagangan internasional. Namun, meskipun memiliki keunggulan geografis dan kebijakan ekonomi yang mendukung, daya saing Batam dalam menarik investasi masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk birokrasi yang kompleks, ketergantungan pada kebijakan pusat, serta persaingan dengan kawasan industri lain di Asia Tenggara. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tidak hanya berorientasi pada insentif ekonomi tetapi juga mampu mempromosikan citra internasional Kota Batam melalui Free Trade Zone sebagai kawasan industri dan perdagangan yang kompetitif.

Beberapa penelitian sebelumnya (Harakan & Taufik, 2023; Fathun, 2021) telah menyoroti peran paradiplomasi dalam meningkatkan daya saing ekonomi daerah, namun kajian yang secara spesifik membahas bagaimana paradiplomasi diterapkan dalam

konteks Free Trade Zone masih terbatas. Studi-studi tersebut lebih banyak berfokus pada dampak ekonomi dan regulasi FTZ, tetapi belum mengulas secara mendalam strategi pemerintah daerah dalam memanfaatkan hubungan internasional untuk memperkuat daya saing kawasan. Padahal, dalam era globalisasi, pemerintah daerah dapat memainkan peran aktif dalam diplomasi ekonomi guna menarik investor asing dan memperluas akses pasar global. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah dalam kajian paradiplomasi dengan menganalisis bagaimana pemerintah daerah Batam dapat mengoptimalkan peran paradiplomasi sebagai strategi untuk meningkatkan investasi dan memperkuat citra internasional Kota Batam melalui Free Trade Zone. Fokus utama penelitian ini adalah memahami sejauh mana kewenangan pemerintah daerah dalam membangun kerja sama ekonomi internasional, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta merumuskan strategi efektif yang dapat diterapkan guna memperkuat daya saing Batam sebagai kawasan industri dan perdagangan bertaraf internasional.

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Penelitian ini berfokus pada dampak serta tantangan yang dihadapi oleh Zona Perdagangan Bebas di Kota Batam, sebuah inisiatif strategis yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia. Kota Batam, yang awalnya dikenal sebagai pulau

kecil tanpa infrastruktur yang memadai, telah mengalami transformasi signifikan menjadi salah satu pusat industri dan investasi terkemuka di Indonesia. Berkat posisinya yang strategis dekat dengan Singapura dan Malaysia, Batam telah menjadi magnet utama bagi investasi asing dan aktivitas bisnis internasional. Pertumbuhan ekonominya didukung oleh sektor-sektor kunci seperti industri manufaktur, konstruksi, dan perdagangan, yang berperan penting dalam menggerakkan PDRB kota ini selama periode 2010-2016.

Meskipun pertumbuhannya yang pesat, Batam masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk infrastruktur yang belum sepenuhnya terintegrasi dan kebutuhan akan pengelolaan sumber daya manusia yang lebih baik. Implementasi Zona Perdagangan Bebas di Batam, dengan semua keistimewaan yang ditawarkannya seperti pembebasan pajak dan cukai serta penyederhanaan birokrasi, menjadi kunci untuk mengatasi tantangan ini dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, tantangan seperti pemangkasan waktu proses perizinan yang optimal dan pengembangan infrastruktur yang memadai tetap menjadi fokus penting untuk keberhasilan zona ini dalam memacu ekonomi lokal dan nasional.

Penelitian ini menggunakan data yang tercatat sejak tahun 2016 sampai tahun 2024 atau saat masa kepemimpinan Bapak Muhammad Rudi sebagai Walikota Batam sekaligus Kepala Badan Pengusahaan

Batam Ex-Officio. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, timbul pertanyaan yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian.

1. Bagaimana tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kota Batam dalam mempromosikan Free Trade Zone sebagai citra kotanya?
2. Bagaimana peluang yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kota Batam dalam mempromosikan Free Trade Zone sebagai citra kotanya?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak Zona Perdagangan Bebas di Batam terhadap citra kota yang ingin dibangun di mata internasional serta relevansi konsep paradiplomasi dalam konteks ini. Beberapa tujuan spesifik dari penelitian ini meliputi:

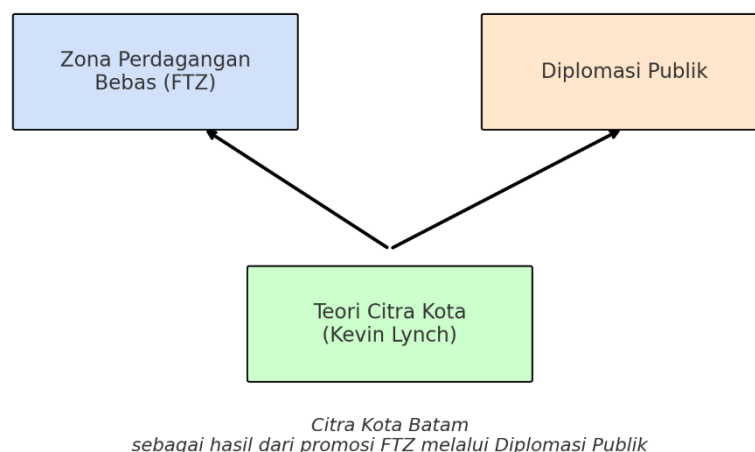
1. Untuk menganalisis tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kota Batam dalam mempromosikan Free Trade Zone sebagai citra kotanya.
2. Untuk menganalisis peluang yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kota Batam dalam mempromosikan Free Trade Zone sebagai citra kotanya.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam studi ekonomi

regional dan diplomasi lokal. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah Kota Batam dan entitas serupa dalam merancang kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui optimalisasi Zona Perdagangan Bebas dan penerapan strategi paradiplomasi yang efektif untuk membangun citra kota di mata internasional.

#### D. Kerangka Konseptual

Gambar 1.1 Kerangka Konseptual



##### 1. Zona Perdagangan Bebas

Zona perdagangan bebas atau *Free Trade Zone*, yang selanjutnya akan disingkat menjadi FTZ, mewakili wilayah tertentu di dalam perbatasan suatu negara di mana berbagai kegiatan ekonomi, seperti impor, penyimpanan, penanganan, pembuatan, dan re-ekspor barang, dapat dilakukan berdasarkan peraturan bea cukai tertentu yang biasanya mengecualikan kegiatan-kegiatan tersebut dari

kegiatan rutin. bea masuk. Zona-zona ini berlokasi strategis di dekat pusat transportasi utama seperti pelabuhan laut, bandara, atau perbatasan nasional, yang memberikan keuntungan logistik bagi perdagangan dan perdagangan internasional.

Tujuan utama FTZ mempunyai banyak aspek. Pertama, tujuan mereka adalah meningkatkan pendapatan devisa suatu negara dengan memfasilitasi ekspor dan menarik investasi asing langsung (FDI). Dengan menawarkan lingkungan yang kondusif bagi perdagangan internasional, FTZ mendorong dunia usaha untuk melakukan operasi di zona-zona tersebut, sehingga meningkatkan ekspor barang dan jasa yang diproduksi secara lokal. Kedua, FTZ berfungsi sebagai katalisator pengembangan industri berorientasi ekspor. Mereka menyediakan platform bagi industri untuk berkembang, dengan fokus pada manufaktur dan pengolahan barang yang terutama ditujukan untuk pasar internasional. Fokus ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja di kawasan tersebut tetapi juga meningkatkan kontribusi nilai tambah terhadap perekonomian nasional.

Tujuan penting lainnya dari FTZ adalah untuk mendorong pembangunan regional. Dengan mendesentralisasikan kegiatan ekonomi jauh dari pusat kota yang padat, FTZ mendorong pembentukan pusat ekonomi baru di wilayah yang kurang berkembang. Desentralisasi ini membantu menyeimbangkan

pertumbuhan ekonomi di seluruh negeri, mengurangi kesenjangan regional dan meningkatkan stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Secara struktural, FTZ beroperasi berdasarkan kerangka kerja tertentu di mana operator atau pengembang, baik entitas negara atau organisasi swasta, bertanggung jawab untuk menyediakan infrastruktur dan dukungan operasional yang diperlukan di dalam zona tersebut. Pengguna FTZ, yang dapat berupa individu atau korporasi, diberikan hak istimewa untuk melakukan aktivitas tertentu seperti memproduksi atau memproses barang, dengan ketentuan yang membatasi operasi mereka hanya dalam batas-batas zona tersebut.

Pengelolaan dan pengawasan kegiatan FTZ biasanya diawasi oleh Kementerian Ekonomi dan Keuangan, seringkali melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai. Pengawasan peraturan ini memastikan kepatuhan terhadap undang-undang nasional dan perjanjian perdagangan internasional sekaligus menjaga potensi pelanggaran atau kegiatan terlarang.

Manfaat beroperasi dalam FTZ sangat besar. Dunia usaha dan investor menikmati pembebasan pajak atas pajak nasional seperti pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai, yang secara signifikan mengurangi biaya operasional dan meningkatkan profitabilitas. Prosedur bea cukai yang disederhanakan menyederhanakan pergerakan barang masuk dan keluar dari zona tersebut, meningkatkan efisiensi dan mengurangi penundaan

birokrasi yang terkait dengan transaksi perdagangan internasional. Selain itu, FTZ menumbuhkan lingkungan bisnis yang kompetitif yang mendorong inovasi, kemajuan teknologi, dan penerapan praktik terbaik dalam perdagangan dan logistik global.

Terlepas dari kelebihan-kelebihan tersebut, FTZ juga menghadapi tantangan yang perlu diatasi. Mereka dapat menjadi magnet bagi aktivitas terlarang seperti pemalsuan, penyelundupan, atau pencucian uang, yang melemahkan upaya regulasi dan mencoreng reputasi kawasan. Selain itu, kurangnya mekanisme pengawasan dan pemantauan yang komprehensif di beberapa FTZ dapat menimbulkan tantangan tata kelola, yang berpotensi membahayakan keamanan dan kepatuhan terhadap peraturan.

Contoh keberhasilan FTZ di seluruh dunia menunjukkan dampaknya terhadap perekonomian nasional dan dinamika perdagangan global. Misalnya, Uruguay memiliki banyak FTZ yang berspesialisasi dalam berbagai industri, termasuk Zona Franca Colonia dan Zona Franca Libertad, yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap strategi pertumbuhan negara yang berorientasi ekspor. Demikian pula, Zona Perdagangan Bebas Percontohan Tiongkok (Shanghai) telah memelopori kebijakan inovatif yang bertujuan untuk mempercepat e-commerce lintas batas dan mendorong sektor jasa maju, serta menjadi model bagi negara-negara

lain yang ingin meniru keberhasilannya dalam mempromosikan perdagangan internasional dan pembangunan ekonomi (WCO, 2020).

Zona perdagangan bebas memainkan peran penting dalam perekonomian modern dengan memfasilitasi perdagangan internasional, menarik investasi, mendorong pertumbuhan industri, dan mendorong pembangunan regional. Meskipun teknologi ini menawarkan manfaat besar, pengelolaan yang efektif, pengawasan peraturan, dan adaptasi berkelanjutan terhadap tren ekonomi global sangat penting untuk memaksimalkan potensinya dan memitigasi risiko yang terkait (OECD, 2018).

## **2. Diplomasi Publik**

Asal usul diplomasi publik dapat ditelusuri kembali ke era Perang Dingin, saat Amerika Serikat mulai menyadari semakin pentingnya opini publik dalam membentuk kebijakan luar negeri. Ketika media massa muncul sebagai kekuatan dominan, interaksi tradisional antar pemerintah tidak lagi memadai; ada kebutuhan mendesak untuk terlibat langsung dengan penduduk asing. Pergeseran ini sangat dipengaruhi oleh konsep soft power Joseph Nye, yang menggarisbawahi kemampuan untuk menarik dan mengkooptasi dibandingkan mengandalkan paksaan, menekankan peran budaya, nilai-nilai, dan kebijakan dalam hubungan internasional. Oleh karena itu, soft power menjadi landasan dalam memahami bagaimana

diplomasi publik dapat digunakan untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri (Snow, 2020).

Diplomasi publik didefinisikan sebagai upaya pemerintah untuk berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat asing, dengan tujuan mempengaruhi persepsi dan pendapat mereka mengenai kebijakan atau kepentingan nasional tertentu. Ini beroperasi melalui dua strategi utama: branding, atau komunikasi budaya, dan advokasi politik. Branding berfokus pada peningkatan citra suatu negara dengan memupuk niat baik dan mendorong kerja sama dalam berbagai isu, seringkali tanpa tujuan kebijakan langsung. Sebaliknya, advokasi politik lebih bertarget, berupaya menggalang dukungan bagi kebijakan atau tindakan tertentu, seringkali sebagai respons terhadap tantangan geopolitik yang mendesak. Strategi-strategi ini bergantung pada mekanisme seperti kampanye media, pertukaran budaya, inisiatif pendidikan, dan komunikasi langsung oleh pejabat pemerintah, semuanya dirancang untuk menumbuhkan saling pengertian dan membangun persepsi positif di kalangan masyarakat asing. Terlepas dari penerapan praktisnya, diplomasi publik secara teori masih terbelakang, sehingga memicu perdebatan di kalangan akademisi mengenai ruang lingkup dan definisinya. Beberapa orang berpendapat bahwa ini merupakan perpanjangan dari diplomasi tradisional, yang hanya menggabungkan keterlibatan publik ke dalam praktik diplomasi yang sudah ada (Melissen, 2005).

Ada pula yang berpendapat bahwa diplomasi publik merupakan bidang tersendiri yang memerlukan kerangka teori tersendiri, terutama mengingat evolusinya di era digital dan semakin menonjolnya peran masyarakat sipil global. Seiring dengan adaptasi terhadap teknologi komunikasi baru dan perubahan lanskap geopolitik, diplomasi publik menghadirkan peluang dan tantangan dalam merancang kebijakan luar negeri yang efektif (Elvianti, 2015). Diplomasi publik memainkan peran penting dalam mencapai tujuan kebijakan luar negeri dengan membentuk persepsi, membina hubungan, dan memfasilitasi komunikasi antar negara dan publik asing. Pada intinya, hal ini bertujuan untuk mempengaruhi cara suatu negara dipandang secara internasional, memastikan bahwa kebijakan dan nilai-nilai budayanya dapat diterima secara positif oleh masyarakat eksternal. Dengan menciptakan dan mempromosikan citra yang baik, diplomasi publik membantu menggalang dukungan untuk tujuan kebijakan luar negeri, khususnya dalam konteks di mana opini publik di negara lain dapat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi keputusan politik. Aspek ini sangat penting dalam lingkungan demokrasi di mana para pemimpin asing sering kali menanggapi persepsi konstituen mereka terhadap peristiwa-peristiwa global (Brown, 2017).

Komponen utama diplomasi publik adalah kemampuannya untuk meningkatkan *soft power*—kapasitas untuk menarik dan mengkooptasi, bukan memaksa. Melalui inisiatif seperti pertukaran

budaya, program pendidikan, dan komunikasi strategis, negara-negara dapat memproyeksikan daya tarik dan nilai-nilai mereka di panggung global. Hal ini memudahkan untuk mendapatkan kerja sama internasional, menyelaraskan sentimen asing dengan tujuan diplomatik. Diplomasi publik juga memfasilitasi dialog di luar jalur tradisional pemerintah, melibatkan masyarakat sipil dalam diskusi mengenai tantangan bersama seperti perubahan iklim, kesehatan global, dan keamanan. Upaya inklusif seperti ini sering kali menghasilkan solusi kolaboratif yang memenuhi kepentingan bersama (Merickova, 2014).

Teori diplomasi publik relevan untuk memahami konsep paradiplomasi yang diterapkan pemerintah Kota Batam dalam meningkatkan citra kota. Paradiplomasi, sebagai diplomasi subnasional, memanfaatkan strategi seperti membentuk persepsi publik, meningkatkan soft power, dan memfasilitasi komunikasi lintas budaya. Pemerintah Kota Batam menggunakan media, promosi budaya, dan kegiatan internasional untuk menonjolkan keunggulan kota, seperti lokasinya yang strategis dan potensi ekonominya. Melalui program pertukaran budaya dan kerjasama internasional, Batam membangun hubungan jangka panjang, meningkatkan daya tariknya di tingkat global, serta memperkuat jejaring diplomasi. Dengan melibatkan masyarakat lokal, strategi ini menciptakan sinergi antara

kebutuhan lokal dan harapan global, sehingga memperkuat citra Batam sebagai kota modern, progresif, dan ramah investasi.

Paradiplomasi merujuk pada keterlibatan pemerintah non-pusat dalam ranah hubungan internasional. Konsep ini mencakup berbagai praktik seperti kota kembar, jaringan lintas negara, kerja sama terdesentralisasi, dan partisipasi dalam forum-forum internasional. Dalam konteks ini, pemerintah daerah memiliki peran aktif dalam mempengaruhi urusan internasional, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat berjalan seiring, melengkapi, atau bahkan berlawanan dengan diplomasi negara pusat (Oddone, 2023).

Paradiplomasi muncul dari kebutuhan pemerintah daerah untuk menjalankan fungsinya dalam skala internasional, baik untuk mempromosikan kepentingan ekonomi lokal, memperkuat identitas budaya, maupun mencapai tujuan politik tertentu. Melalui praktik seperti kerja sama kota kembar atau kemitraan lintas wilayah, pemerintah daerah dapat membangun jaringan internasional yang menguntungkan dalam hal pertukaran budaya dan pembangunan ekonomi lokal. Selain itu, berbagai jenis paradiplomasi, seperti paradiplomasi regional lintas batas dan paradiplomasi transregional, memungkinkan pemerintah daerah untuk bekerja sama dalam menangani isu-isu bersama, seperti perlindungan lingkungan atau pengembangan infrastruktur (Suhendrik et al., 2021).

Dalam konteks Batam, paradiplomasi menjadi instrumen strategis bagi pemerintah daerah untuk memperkuat daya saing kawasan melalui *Free Trade Zone* (FTZ). Sebagai kota dengan lokasi strategis dan kebijakan perdagangan bebas, Batam memiliki potensi besar untuk menarik investasi asing dan memperluas akses pasar global. Namun, tantangan dalam birokrasi, keterbatasan sumber daya, dan persaingan dengan kawasan industri lain di Asia Tenggara menuntut strategi yang lebih proaktif dalam membangun citra internasionalnya.

Teori diplomasi publik relevan untuk memahami bagaimana konsep paradiplomasi diterapkan oleh pemerintah Kota Batam dalam meningkatkan citra kota. Sebagai bagian dari diplomasi subnasional, paradiplomasi di Batam memanfaatkan strategi komunikasi global untuk membangun persepsi positif, meningkatkan daya tarik investasi, dan memperluas jaringan internasional. Pemerintah Kota Batam menggunakan berbagai saluran komunikasi, termasuk media, promosi budaya, dan partisipasi dalam kegiatan internasional, untuk menonjolkan keunggulan Batam sebagai pusat industri dan perdagangan.

Melalui program pertukaran budaya, kerja sama ekonomi, serta keterlibatan dalam forum internasional, Batam tidak hanya memperkuat koneksi globalnya tetapi juga membangun reputasi sebagai kota modern, progresif, dan ramah investasi. Dengan

melibatkan masyarakat lokal dalam strategi diplomasi publik, paradiplomasi Batam menciptakan sinergi antara kepentingan daerah dan ekspektasi global. Hal ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat citra internasional Kota Batam melalui *Free Trade Zone*, sekaligus meningkatkan daya saingnya dalam ekosistem perdagangan global.

### **3. Teori Citra Kota**

Teori yang menjelaskan tentang citra kota yang cukup tersohor adalah Kevin Lynch. Karya penting Kevin Lynch, *The Image of the City*, yang diterbitkan pada tahun 1960, menyelidiki cara individu memandang lingkungan perkotaan dan membangun peta mental berdasarkan pengalaman mereka. Studi inovatif ini merupakan hasil penyelidikan ekstensif selama lima tahun yang dilakukan di kota-kota seperti Boston, Jersey City, dan Los Angeles. Melalui penelitiannya, Lynch mengidentifikasi lima elemen mendasar yang membentuk "kemampuan pencitraan" sebuah kota—istilah yang ia ciptakan untuk menggambarkan kemudahan orang dalam bernavigasi dan membentuk representasi mental dari lingkungan sekitar mereka. Konsep ini menyoroti interaksi antara lingkungan fisik dan persepsi manusia, yang meletakkan dasar bagi pemahaman yang lebih mendalam tentang ruang perkotaan (Lynch, 1964).

Dalam eksplorasinya terhadap lingkungan perkotaan, Kevin Lynch mengidentifikasi lima elemen kunci yang membentuk citra

sebuah kota dan memengaruhi cara individu memandang dan menavigasi kota tersebut.

Wawasan Lynch telah banyak membentuk bidang perencanaan dan desain kota dengan menekankan pentingnya persepsi manusia dalam membentuk lingkungan binaan. Konsep kemampuan pencitraannya telah menjadi landasan dalam disiplin ilmu seperti psikologi lingkungan dan studi perkotaan. Hal ini berfungsi sebagai prinsip panduan bagi para perencana dan arsitek, mendorong penciptaan ruang kota yang sesuai dengan pengalaman dan representasi mental penghuninya. Dengan berfokus pada bagaimana elemen fisik berinteraksi dengan kognisi manusia, karya Lynch telah menyediakan alat untuk merancang kota yang tidak hanya fungsional namun juga berkesan dan bermakna bagi penghuninya. Maka dapat kita pahami bahwa *The Image of the City* menawarkan perspektif yang sangat berharga mengenai bagaimana ruang kota dirasakan dan dinavigasi. Hal ini menggarisbawahi hubungan dinamis antara atribut fisik sebuah kota dan pengalaman subjektif penggunanya, sehingga membentuk pemahaman kolektif kita tentang kehidupan perkotaan. Melalui penelitian perintis Lynch, konsep kemampuan pencitraan terus menginspirasi upaya untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang mudah dinavigasi dan sangat menarik (Sarasa, 2023).

Teori Kevin Lynch, sebagaimana diutarakan dalam *The Image of the City* (1960), telah berkembang secara signifikan seiring

berjalannya waktu, beradaptasi dengan tantangan perkotaan kontemporer dan mengintegrasikan perspektif yang lebih luas mengenai pengalaman perkotaan. Salah satu perkembangan besar terletak pada perluasan makna ruang perkotaan, khususnya melalui penggabungan konteks budaya. Interpretasi selanjutnya atas karya Lynch menekankan bahwa persepsi individu terhadap elemen perkotaan tidak hanya dibentuk oleh karakteristik fisik tetapi juga oleh latar belakang budaya, kelas sosial, dan pengalaman pribadi. Pergeseran ini mengakui bahwa kota dipenuhi dengan narasi pribadi dan kolektif yang memberikan makna lebih dalam pada lokasi tertentu (Damayanti, 2015).

Selain itu, tulisan Lynch selanjutnya menggarisbawahi pentingnya menumbuhkan "sense of place" dalam desain perkotaan. Ia berpendapat bahwa lingkungan perkotaan seharusnya melakukan lebih dari sekedar memfasilitasi navigasi fisik; mereka juga harus membina hubungan emosional dan rasa memiliki di antara warga. Perspektif ini mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan seperti kreativitas dan keadilan ke dalam proses desain, melampaui fungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat perkotaan yang lebih luas. Evolusi teori Lynch juga dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Munculnya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah mengubah cara masyarakat menavigasi dan memandang kota. Teknologi ini telah mendorong evaluasi ulang lima elemen awal Lynch—jalur,

tepiian, distrik, simpul, dan landmark—yang menyoroti bagaimana alat digital dapat mengubah peta mental dan meningkatkan akurasi spasial. Selain itu, pendekatan berbasis data telah dimasukkan ke dalam analisis perkotaan, sehingga memungkinkan para peneliti untuk lebih memahami dinamika elemen perkotaan dalam sistem sosial dan ekonomi yang kompleks.

Dengan mengintegrasikan analisis data, kerangka kerja Lynch telah diperluas untuk mengatasi permasalahan kontemporer dengan presisi dan kemampuan beradaptasi yang lebih baik. Meskipun pengaruhnya luas, teori Lynch telah menghadapi kritik, khususnya mengenai penerapan kelima elemennya secara dangkal tanpa sepenuhnya memahami keterkaitan atau makna kontekstualnya. Meskipun penerapan konsepnya di dunia nyata telah memvalidasi relevansinya, kritik ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang lebih berbeda. Khususnya, Lynch sendiri terlibat dalam kritik diri, mengakui keterbatasan dalam kerangka aslinya, terutama mengenai dimensi budaya makna perkotaan (Wessel, 2018).

Teori *The Image of the City* karya Kevin Lynch sangat relevan untuk menjawab rumusan masalah tentang bagaimana konsep paradiplomasi diterapkan oleh pemerintah daerah Kota Batam dalam meningkatkan citra kota. Lynch menekankan pentingnya elemen-elemen fisik kota—seperti jalur, batas, distrik, simpul, dan landmark—dalam membentuk citra kota yang dapat dikenali dan memberikan

pengalaman positif bagi penduduk maupun pengunjung. Dalam konteks paradiplomasi, elemen-elemen ini dapat menjadi instrumen strategis untuk memperkuat daya tarik Kota Batam di tingkat regional maupun internasional. Dengan mengintegrasikan pendekatan Lynch, pemerintah daerah dapat merancang kota yang tidak hanya fungsional tetapi juga mampu menciptakan *sense of place* yang kuat, mendukung promosi budaya lokal, dan memperkuat identitas kota sebagai pusat investasi dan pariwisata. Selain itu, melalui penggabungan teknologi informasi dan analisis data, teori ini juga membantu merumuskan strategi promosi yang berbasis pada pemahaman mendalam tentang bagaimana citra Kota Batam dipersepsikan oleh berbagai pemangku kepentingan, baik domestik maupun global. Hal ini menjadikan teori Lynch sebagai kerangka analitis yang relevan untuk memahami hubungan antara desain urban, diplomasi lokal, dan peningkatan citra kota secara komprehensif.

#### **E. Metode Penelitian**

Berkenaan dengan metode penelitian dalam penelitian ini, terdapat beberapa hal seperti lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

##### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di wilayah Kota Batam dengan berfokus pada institusi pemerintah daerah yaitu Badan Pengusahaan (BP) Batam.

##### **2. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena yang terjadi dalam konteks tertentu (Creswell, 2009). Dalam hal ini, fenomena paradiplomasi yang diterapkan oleh pemerintah daerah Kota Batam dalam upaya meningkatkan citra kota akan dianalisis secara holistik dan deskriptif. Tujuan utama dari penelitian kualitatif ini adalah untuk menggali pemahaman yang lebih dalam mengenai pengaruh paradiplomasi terhadap citra Kota Batam, serta hubungan antara kebijakan lokal dan strategi internasional yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Dalam penelitian ini, tipe deskriptif-analitis digunakan untuk mendeskripsikan fenomena secara sistematis, akurat, dan komprehensif, sekaligus menganalisis keterkaitan antar elemen. Melalui metode ini, peneliti dapat mengidentifikasi bagaimana elemen-elemen paradiplomasi diterapkan oleh pemerintah daerah Kota Batam dan bagaimana konsep tersebut mendukung pembentukan citra kota.

### **3. Sumber Data**

Dalam penelitian ini, data akan diperoleh dari dua sumber, yaitu:

#### **a. Data primer**

Data yang diperoleh langsung dari informan, dengan memakai teknik pengumpulan berupa data interview (wawancara) serta melakukan observasi (pengamatan langsung) terhadap objek penelitian.

**b. Data sekunder**

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan, maupun arsip-arsip resmi, serta literatur yang relevan dalam melengkapi data primer penelitian. Data ini dapat mencakup dokumen resmi seperti laporan tahunan pemerintah Kota Batam, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), kebijakan terkait paradiplomasi, dan tata kelola kota. Selain itu, data juga diperoleh dari jurnal akademik yang relevan, buku referensi terkait citra kota dan paradiplomasi, laporan dari lembaga internasional, artikel berita dari media massa, serta publikasi daring. Penelitian ini juga dapat memanfaatkan data-data terkait dengan implementasi paradiplomasi di kota-kota lain yang memiliki karakteristik serupa, guna memberikan perbandingan dan pemahaman yang lebih mendalam. Data sekunder ini penting untuk memberikan dasar yang kuat dan cakupan luas mengenai isu-isu yang dibahas dalam penelitian.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan studi pustaka atau *literature review*. Wawancara (*interview*) adalah proses interaksi verbal antara dua pihak yang bertujuan untuk membangun pemahaman bersama mengenai suatu topik. Wawancara dilakukan agar dapat mendengar pendapat dari tokoh-tokoh kunci yang relevan dengan topik penelitian untuk memperkaya data dan analisis (Sugiyono, 2016). Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan menelaah dokumen-dokumen tertulis yang relevan untuk memperoleh informasi yang mendukung penelitian (Djamba & Neuman, 2002). Dalam konteks penelitian ini, studi pustaka digunakan untuk mengidentifikasi kebijakan paradiplomasi yang diterapkan oleh Kota Batam, mengeksplorasi elemen-elemen desain urban dalam kerangka teori yang ada. Pengumpulan informasi melalui kajian literatur yang ada, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, serta dokumen yang relevan mengenai konsep paradiplomasi, Zona Perdagangan Bebas, dan citra kota. Studi pustaka dilakukan untuk memperkaya pemahaman tentang teori-teori yang menjadi dasar penelitian ini, serta untuk membandingkan temuan-temuan yang ada di dalam literatur.

#### **5. Teknik Analisis Data**

Berangkat dari penelitian ini, untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan dan diseleksi digunakan teknik analisis data deskriptif-kualitatif, yaitu data-data yang telah dihimpun dan dikumpulkan baik primer maupun sekunder selanjutnya disusun, dianalisis, diinterpretasikan untuk kemudian dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban atas masalah yang diteliti. Pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara induktif yaitu dari data dan fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkret, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus itu digeneralisasikan atau dianalisis ketingkat abstraksi yang lebih tinggi.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Zona Perdagangan Bebas (*Free Trade Zone*)**

Zona Perdagangan Bebas (FTZ) memiliki sejarah panjang sebagai bidang yang ditunjuk yang memfasilitasi perdagangan internasional dengan menawarkan pengecualian dari bea cukai dan kendala peraturan. FTZ paling awal yang diketahui didirikan di pulau Delos Yunani pada 166 SM, berfungsi sebagai pusat perdagangan bebas bea sampai penurunan karena pembajakan. Secara tradisional terletak di dekat pusat transportasi utama, FTZ awalnya berfokus pada manufaktur tetapi kemudian diperluas untuk memasukkan industri jasa seperti keuangan dan pengembangan perangkat lunak. Saat ini, zona -zona ini tetap penting untuk merangsang perdagangan, mendorong investasi asing, dan mendukung pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia (Tiefenbrun, 2012).

Zona perdagangan bebas (FTZ) memainkan peran penting dalam hubungan internasional dengan mendorong perdagangan, integrasi ekonomi, dan negosiasi politik di antara negara -negara. Sebagai area yang ditunjuk di mana barang dapat diimpor, diproses, dan diekspor kembali tanpa bea cukai standar, FTZ mengurangi hambatan perdagangan seperti tarif dan kuota, meningkatkan efisiensi perdagangan. Dengan mempromosikan integrasi ekonomi, zona -zona ini mendorong spesialisasi berdasarkan keunggulan komparatif,

yang mengarah pada peningkatan volume perdagangan dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Namun, pendirian mereka sangat terkait dengan pertimbangan politik, karena negara -negara menegosiasikan perjanjian perdagangan yang membentuk prosedur bea cukai, struktur tarif, dan mekanisme penyelesaian perselisihan, seringkali mencerminkan dinamika kekuasaan yang lebih luas dalam hubungan internasional (Cekindo Business International, 2023).

Sementara FTZ menawarkan banyak manfaat - seperti harga konsumen yang lebih rendah, penciptaan lapangan kerja, dan investasi langsung asing - mereka juga menghadapi kritik. Beberapa berpendapat bahwa mereka berkontribusi pada kehilangan pekerjaan di industri domestik ketika perusahaan memindahkan produksi ke daerah -daerah dengan tenaga kerja yang lebih murah, sementara yang lain menyatakan keprihatinan tentang potensi degradasi lingkungan dan ketergantungan ekonomi pada pasar tertentu. Tren baru -baru ini menunjukkan lonjakan global di FTZ, mendorong organisasi seperti OECD untuk mengadvokasi transparansi yang lebih besar dan tata kelola yang lebih kuat untuk mengurangi risiko seperti perdagangan terlarang. Terlepas dari tantangan ini, FTZ tetap menjadi instrumen utama dalam kebijakan ekonomi global, menyeimbangkan peluang ekonomi dengan masalah peraturan.

Pembentukan Zona Perdagangan Bebas (FTZ) mengikuti proses hukum dan administrasi terstruktur yang dirancang untuk

menyelaraskan dengan kebijakan ekonomi nasional dan strategi perdagangan global. Ini dimulai dengan diberlakukannya undang - undang spesifik yang menguraikan kerangka kerja untuk tata kelola FTZ, termasuk insentif untuk bisnis, pedoman operasional, dan peraturan bea cukai (Prabowo & Sinaga, 2020).

Undang -undang ini memberikan dasar bagi FTZ dengan memastikan kejelasan peraturan dan mendefinisikan manfaat bagi perusahaan yang beroperasi di dalam zona. Misalnya, Undang-Undang Zona Perwakilan Luar Negeri tahun 1934 di Amerika Serikat menetapkan preseden untuk kerangka kerja serupa di negara-negara lain. Pemerintah kemudian mengidentifikasi lokasi strategis untuk FTZ, sering memilih area di dekat pusat transportasi utama seperti pelabuhan, bandara, dan penyeberangan perbatasan untuk memaksimalkan efisiensi perdagangan. Otoritas lokal atau entitas swasta dapat mengajukan aplikasi untuk membangun FTZ, menunjukkan potensi manfaat ekonomi, termasuk peningkatan aktivitas perdagangan, pertumbuhan industri, dan penciptaan lapangan kerja.

Proses persetujuan melibatkan penilaian menyeluruh oleh lembaga pemerintah untuk memastikan FTZ yang diusulkan memenuhi kriteria ekonomi dan logistik sambil menyelaraskan dengan kebijakan perdagangan nasional. Konsultasi publik dan kepatuhan terhadap perjanjian perdagangan internasional juga dapat diperlukan

sebelum persetujuan akhir. Setelah disetujui, FTZ yang ditunjuk mengalami pengembangan, termasuk membangun infrastruktur penting seperti gudang, fasilitas bea cukai, dan hubungan transportasi untuk memfasilitasi operasi perdagangan yang mulus. Pemerintah secara resmi menyatakan daerah tersebut sebagai FTZ melalui pemberitahuan atau keputusan resmi, yang memungkinkan bisnis beroperasi di bawah peraturan perdagangan khusus.

Perusahaan di dalam zona tersebut harus memasuki perjanjian dengan otoritas lokal atau administrator zona untuk memastikan kepatuhan dengan prosedur bea cukai dan langkah-langkah keamanan sebelum memulai operasi. Untuk mempertahankan transparansi dan akuntabilitas, FTZ tunduk pada pemantauan dan pelaporan yang berkelanjutan. Pemerintah menegakkan persyaratan pelaporan tahunan untuk melacak kegiatan seperti volume impor dan ekspor, tingkat produksi, dan kepatuhan terhadap standar peraturan. Evaluasi ini membantu menilai dampak ekonomi FTZ dan memastikan mereka berkontribusi pada tujuan perdagangan nasional. Dengan mengikuti proses terstruktur ini, negara-negara membentuk FTZ untuk menarik investasi asing, meningkatkan potensi ekspor, dan mengintegrasikan ke dalam jaringan perdagangan global sambil mempertahankan pengawasan peraturan dan stabilitas ekonomi (International Trade Administration, 2022).

Indonesia telah secara strategis mengembangkan beberapa zona perdagangan bebas (FTZ) untuk memperkuat kerangka ekonominya, menarik investasi asing, dan meningkatkan perdagangan internasional. Zona-zona ini adalah area yang ditunjuk di mana barang dapat diimpor, diproses, dan diekspor kembali tanpa dikeluarkan bea cukai, pajak pertambahan nilai (PPN), atau pajak barang mewah, menciptakan lingkungan yang ramah bisnis yang mendorong industri yang digerakkan oleh ekspor. Dengan menawarkan manfaat seperti itu, Indonesia bertujuan untuk meningkatkan daya saing di pasar global sambil mempromosikan pembangunan ekonomi regional (DHL Indonesia, 2025).

Saat ini, Indonesia memiliki empat FTZ utama: Sabang, Batam, Karimun, dan Bintan, masing-masing melayani fungsi ekonomi yang berbeda. Sabang, yang terletak di titik paling barat Indonesia, memainkan peran penting dalam pengiriman internasional di sepanjang Selat Malaka, dengan fokus pada pariwisata, perikanan, dan logistik pelabuhan (Medina, 2023). Batam, yang dekat dengan Singapura, telah berkembang menjadi pusat industri utama yang berspesialisasi dalam manufaktur dan logistik elektronik, mendapat manfaat dari kebijakan perdagangan yang menguntungkan yang memfasilitasi perdagangan lintas batas. Ini juga terintegrasi dengan Zona Ekonomi Khusus Galang Batam, yang berspesialisasi dalam pemurnian alumina, memperkuat dorongan Indonesia untuk

diversifikasi industri. Bisnis yang beroperasi dalam FTZ ini menikmati insentif signifikan yang dirancang untuk merangsang kegiatan ekonomi. Ini termasuk pembebasan pajak atas bahan baku impor, barang-barang menengah, dan produk jadi yang tetap berada di dalam zona. Selain itu, prosedur bea cukai disederhanakan, mengurangi rintangan birokrasi dan mempercepat operasi perdagangan. Industri tertentu dan investor skala besar juga dapat memenuhi syarat untuk insentif investasi, seperti liburan pajak atau tunjangan, lebih lanjut meningkatkan daya tarik zona ini. Terlepas dari kesamaan, FTZ dan zona ekonomi khusus (KEK) melayani berbagai tujuan dalam kerangka ekonomi Indonesia. Sementara FTZ berfokus terutama pada memfasilitasi manufaktur perdagangan dan berorientasi ekspor dengan meredakan pembatasan ekspor impor, KEK mencakup kegiatan ekonomi yang lebih luas, termasuk teknologi, pariwisata, dan layanan. KEK umumnya menawarkan serangkaian insentif yang lebih beragam untuk menarik investasi jangka panjang di berbagai sektor. Dengan mempertahankan FTZ Indonesia, dalam hal ini khususnya Batam dapat memanfaatkan kebijakan ekonomi yang ditargetkan untuk mendorong pertumbuhan di industri tertentu sambil mengintegrasikan ekonominya secara lebih efektif ke dalam jaringan perdagangan global (Medina, 2023).

## **B. Diplomasi Publik**

Diplomasi publik adalah pendekatan strategis yang digunakan oleh pemerintah untuk berkomunikasi dengan publik asing, membentuk persepsi internasional, dan memajukan kepentingan nasional. Tidak seperti diplomasi tradisional, yang berkisar pada negosiasi negara-ke-negara, diplomasi publik memprioritaskan keterlibatan dengan aktor non-pemerintah seperti individu, media, dan organisasi masyarakat sipil. Praktik ini memainkan peran penting dalam mendorong saling pengertian, mempengaruhi opini publik, dan memperkuat status global suatu negara.

Melalui berbagai cara, diplomasi publik berupaya membangun hubungan jangka panjang yang dibangun di atas kepercayaan dan nilai-nilai bersama daripada sekadar mengirimkan pesan resmi pemerintah. Karakteristik utama dari diplomasi publik adalah fokusnya pada keterlibatan dengan publik asing, mengakui bahwa hubungan internasional tidak semata-mata dibentuk oleh interaksi pemerintah tetapi juga oleh sentimen publik dan pertukaran budaya. Untuk mencapai hal ini, negara-negara menggunakan berbagai instrumen dan metode, termasuk program budaya, pertukaran pendidikan, penyiaran internasional, dan penjangkauan media sosial (Krajnc, 2002).

Diplomasi publik berkaitan erat dengan paradiplomasi, sebuah konsep yang diperkenalkan oleh Panayotis Soldatos pada tahun

1980an yang mengacu pada makna *the foreign policy of non-central governments*, hadirnya keterlibatan sub negara untuk melakukan kegiatan diplomasi dan hubungan luar negeri dengan pihak asing dalam mencapai kepentingan tertentu (Ibrahim, 2019).

Istilah Paradiplomasi muncul sebab kehadiran globalisasi yang menuntut perlunya aktor dalam sub-sistem negara untuk melakukan diplomasi, yaitu peran pemerintah daerah atau sejenisnya. Alhasil, konsep paradiplomasi memunculkan berbagai aktor non tradisional seperti kelompok, individu, organisasi dan sub-negara untuk mencapai kepentingannya masing-masing (David, 2008).

Dalam hal ini, diplomasi publik berkaitan erat dengan paradiplomasi dimana diplomasi publik berperan penting dalam menunjang aktivitas paradiplomasi yang bertujuan dalam memperkuat pengaruh dari sikap publik dalam pelaksanaan politik luar negeri, melalui serangkaian strategi untuk merekayasa opini publik di negara lain, menjalin interaksi dengan berbagai elemen kelompok swasta dan kelompok kepentingan, serta untuk melancarkan arus pertukaran gagasan dan informasi antar negara.

Terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan dalam konteks paradiplomasi yang dilakukan sebagai aktor sub-negara, yaitu pembentukan *sister city*, *Foreign Direct Investment* (FDI), pembentukan proyek bersama, dan pengiriman delegasi (Ibrahim, 2019). Menurut Ivo Duchacek (1990), paradiplomasi memungkinkan

daerah untuk mengartikulasikan kepentingannya sendiri dalam arena internasional, baik dalam bentuk kerja sama ekonomi, budaya, maupun lingkungan.

Dengan begitu maka dapat membantu membentuk narasi dan menciptakan persepsi positif tentang kebijakan dan nilai-nilai suatu negara. Selain itu, diplomasi publik modern menekankan komunikasi dua arah, di mana dialog dan pemahaman timbal balik lebih diutamakan daripada pesan satu sisi. Pemerintah dan organisasi secara aktif mendengarkan audiens asing, mengatasi kekhawatiran mereka sambil secara halus mempromosikan perspektif mereka sendiri. Fitur pembeda lainnya dari diplomasi publik kontemporer adalah keterlibatan aktor di luar pemerintah (Snow, 2020).

Di dunia yang saling berhubungan saat ini, LSM, perusahaan multinasional, universitas, dan bahkan individu yang berpengaruh - seperti duta budaya atau influencer digital - berperan dalam membentuk persepsi internasional. Partisipasi yang lebih luas ini mencerminkan kompleksitas komunikasi global yang berkembang dan kebutuhan akan pendekatan beragam yang beragam untuk diplomasi. Selain itu, diplomasi publik melayani tujuan strategis jangka panjang dan jangka pendek. Di satu sisi, ini membantu membangun merek global negara dengan meningkatkan reputasi dan kekuatan lunaknya (USC Center on Public Diplomacy, 2014).

Di sisi lain, dapat digunakan dalam menanggapi masalah politik langsung, seperti mengumpulkan dukungan internasional untuk keputusan kebijakan luar negeri atau melawan informasi yang salah. Konsep diplomasi publik telah berkembang secara signifikan dari waktu ke waktu. Diciptakan pada pertengahan 1960-an oleh Edmund Gullion, istilah ini diperkenalkan untuk membedakannya dari propaganda dan diplomasi tradisional-sentris negara. Sejak itu, diplomasi publik telah menjadi instrumen penting dalam hubungan internasional, beradaptasi dengan kemajuan teknologi baru. Munculnya platform digital dan media sosial telah merevolusi praktik ini, memungkinkan pemerintah dan aktor non-negara untuk terlibat dengan audiens global secara lebih langsung dan interaktif. Ketika hubungan internasional tumbuh lebih kompleks, diplomasi publik terus menjadi alat yang kuat untuk membentuk narasi, memperkuat aliansi, dan menumbuhkan koneksi lintas budaya di dunia yang semakin saling berhubungan.

Gambar 2.1 Indikator Diplomasi Publik

| Impact variable              | Indicators (changes produced in the subjects)                                                                                                                                                                                                                                          | Goal                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Familiarity with the country | Think about the country<br>Update images about the country<br>Turn around unfavorable opinions                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |
| Appreciation of the country  | Create positive perceptions<br>Develop a shared perception of important global issues                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                      |
| Engagement with the country  | Strengthen ties in diverse domains such as education reform or scientific cooperation<br>Develop attractiveness of the country as a destination for tourism, work or learning<br>Make people buy the country's products<br>Get people to understand and subscribe the country's values | Getting foreign companies to invest in one's country<br>Getting foreign publics to back one's positions<br>Getting foreign politicians to turn to one's country as a favored partner |

Source: Adapted from Leonard, Stead, and Smewing (2002, p. 9).

**Sumber:** (Leonard et al., 2002))

Diplomasi publik memiliki indikator dan tujuan yang jelas untuk mengukur efektivitasnya dalam membangun citra dan pengaruh suatu negara di mata publik internasional. Berdasarkan tabel yang diadaptasi dari Leonard, Stead, dan Smewing (2002), diplomasi publik dapat dianalisis melalui tiga variabel dampak utama; kefamiliaran dengan negara, apresiasi terhadap negara, dan keterlibatan dengan negara. Kefamiliaran mengacu pada sejauh mana suatu negara dikenal oleh publik internasional, yang diukur melalui indikator seperti meningkatnya perhatian terhadap negara tersebut, diperbaruinya citra yang ada, serta adanya perubahan opini negatif menjadi lebih positif. Semakin tinggi tingkat kefamiliaran, semakin besar peluang suatu negara untuk mempengaruhi opini global (Leonard et al., 2002).

Selanjutnya, apresiasi terhadap negara berkaitan dengan bagaimana sebuah negara dipersepsikan secara positif dan sejauh mana masyarakat internasional berbagi pandangan serupa mengenai isu-isu global yang dianggap penting. Jika suatu negara berhasil membangun citra positif dan menunjukkan komitmennya terhadap isu-isu global, maka peluangnya untuk mendapatkan dukungan publik asing terhadap kebijakan dan posisinya di tingkat internasional akan semakin besar. Hal ini dapat diwujudkan melalui diplomasi budaya, promosi kebijakan luar negeri yang inklusif, serta peran aktif dalam organisasi internasional.

Sementara itu, keterlibatan dengan negara mencerminkan sejauh mana hubungan antara suatu negara dan masyarakat internasional berkembang dalam berbagai aspek, seperti pendidikan, kerja sama ilmiah, pariwisata, perdagangan, serta penyebaran nilai-nilai nasional. Indikator keterlibatan ini dapat terlihat dari meningkatnya investasi asing, bertambahnya jumlah wisatawan dan pekerja asing yang memilih negara tersebut sebagai destinasi, serta meningkatnya minat terhadap produk lokal. Lebih dari itu, keterlibatan juga mencakup bagaimana negara dapat menyebarkan nilai-nilainya dan mendapatkan dukungan politik dari aktor-aktor global. Pada akhirnya, diplomasi publik yang efektif bertujuan untuk memperkuat posisi negara di dunia, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun

budaya, sehingga negara tersebut dapat menjadi mitra yang diandalkan dalam berbagai kerja sama internasional (Ordeix, 2009).

Dengan konsep ini, maka dapat diimplementasikan dalam melihat bagaimana Kota Batam membangun diplomasi kota secara mandiri melalui strategi paradiplomasi guna memperkuat daya saing global dan citra internasionalnya. Paradiplomasi ini memungkinkan Batam untuk tidak hanya bergantung pada diplomasi nasional, tetapi juga secara proaktif menjalin kerja sama dengan aktor asing, termasuk investor, perusahaan multinasional, dan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Implementasi strategi ini dapat dianalisis melalui efektivitas kebijakan *Free Trade Zone* dalam menarik investasi, meningkatkan ekspor, serta memperkuat sektor pariwisata dan industri berbasis teknologi.

Dalam konteks diplomasi publik yang dilakukan di Kota Batam, konsepsi mengenai paradiplomasi dapat dikaitkan dengan pemerintahan Kota Batam sebagai representasi negara Indonesia sebagai sub-negara dimana paradiplomasi bertujuan dalam memperkuat pengaruh dari sikap publik dalam pelaksanaan politik luar negeri. Paradiplomasi dapat dilakukan dalam beberapa kegiatan seperti pembentukan *sister city*, *Foreign Direct Investment* (FDI), pembentukan proyek bersama, dan pengiriman delegasi (Ibrahim, 2019).

Menurut Jan Melissen (2005), diplomasi publik dalam konteks paradiplomasi memainkan peran penting dalam membangun legitimasi dan daya tarik daerah di panggung global. Kota Batam, sebagai kota industri strategis tentu dapat memanfaatkan posisinya untuk mengembangkan kerja sama lintas batas negara. Pemerintah daerah, melalui Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), aktif melakukan promosi investasi dengan menyasar investor asing dari berbagai negara dimana strategi atau upaya yang dilakukan oleh Kota Batam tidak hanya dilakukan melalui pendekatan diplomatik formal, namun juga melalui diplomasi publik—yakni komunikasi langsung kepada publik internasional, terutama komunitas bisnis, untuk membentuk citra positif Batam sebagai kawasan investasi yang menarik. Dengan demikian, Batam dapat terus memperkuat reputasinya sebagai kota industri maju yang berperan dalam ekosistem ekonomi regional dan global, sekaligus mendukung soft power Indonesia di kancah internasional.

### **C. Teori Citra Kota**

Citra kota merupakan konsep penting dalam perancangan dan pengembangan perkotaan yang menggambarkan kesan mental atau gambaran visual masyarakat terhadap suatu kota. Konsep ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran Kevin Lynch, seorang perencana kota yang dalam bukunya *Image of the City* (1960) mengidentifikasi lima

elemen utama pembentuk citra kota: *path* (jalur), *edge* (tepi), *district* (kawasan), *node* (simpul), dan *landmark* (penanda).

Citra kota merupakan aspek fundamental dalam perencanaan dan pengembangan perkotaan, mencerminkan bagaimana masyarakat memahami dan menavigasi suatu kota. Dalam analisis citra kota, pendekatan Kevin Lynch menjadi acuan utama, di mana lima elemen—*path* (jalur), *edge* (tepi), *district* (kawasan), *node* (simpul), dan *landmark* (penanda)—berperan penting dalam memahami struktur dan persepsi lingkungan kota.

Jalur menentukan bagaimana orang bergerak dan menghubungkan berbagai titik di dalam kota, sehingga analisisnya membantu mengidentifikasi pola mobilitas dan aksesibilitas. Tepi, sebagai batas fisik atau visual, memungkinkan pemetaan zonasi dan diferensiasi antarwilayah. Kawasan dengan karakteristik unik menjadi indikator penting dalam studi identitas dan fungsi ruang perkotaan. Simpul, yang merupakan titik pertemuan strategis, memainkan peran dalam analisis interaksi sosial dan konsentrasi aktivitas ekonomi. Sementara itu, penanda berfungsi sebagai orientasi visual yang memperkuat identitas kota dan membentuk pengalaman spasial masyarakat.

Elemen pertama, jalur, mengacu pada saluran di mana orang bergerak, seperti jalan raya, trotoar, rel kereta api, dan saluran air. Jalur-jalur ini memainkan peran penting dalam memandu pergerakan

dan membentuk pengalaman seseorang terhadap lanskap perkotaan. Selanjutnya, tepi berfungsi sebagai batas yang menentukan wilayah dalam suatu kota. Hal ini dapat berupa struktur fisik, seperti tembok dan garis pantai, atau pemisahan yang dirasakan yang membantu mengatur tata ruang kota dan menciptakan kesan struktur (Moreira, 2021).

Komponen penting lainnya adalah distrik, yang merupakan bagian kota berukuran sedang hingga besar dengan karakteristik yang dapat diidentifikasi. Distrik memberikan kesan tempat dan memungkinkan individu untuk membedakan satu bagian kota dari bagian lain melalui fitur dan suasana uniknya. Node, di sisi lain, adalah titik fokus di mana jalur bertemu, seperti persimpangan, alun-alun, atau landmark penting. Ruang-ruang ini sering kali berfungsi sebagai pusat aktivitas dan interaksi, menyatukan orang-orang dan membina hubungan dalam lingkungan perkotaan. Terakhir, landmark adalah objek atau struktur khas yang menonjol dalam lanskap kota, seperti monumen, bangunan ikonik, atau fitur alam. Berbeda dengan node, landmark terutama digunakan sebagai titik referensi visual untuk navigasi, membantu individu menyesuaikan diri di dalam kota (Zahnd, 1999). Secara keseluruhan, kelima elemen ini—jalur, tepian, distrik, simpul, dan landmark—menciptakan kerangka kerja untuk memahami bagaimana masyarakat membentuk peta mental ruang kota. Mereka menyoroti interaksi antara lingkungan fisik dan persepsi manusia,

sehingga menawarkan sudut pandang berharga yang dapat digunakan untuk menganalisis dan merancang kota guna meningkatkan kemampuan navigasi dan pencitraannya.

Dengan menggunakan lima elemen ini, analisis citra kota dapat menghasilkan wawasan mendalam mengenai bagaimana struktur kota memengaruhi pengalaman dan perilaku masyarakat. Pemahaman ini sangat penting bagi perencana kota dalam merancang tata ruang yang lebih efisien, nyaman, dan mudah dipahami oleh penggunanya. Dalam menganalisis citra Kota Batam sebagai Free Trade Zone (FTZ), lima elemen utama yang dikemukakan oleh Kevin Lynch—*path* (jalur), *edge* (tepi), *district* (kawasan), *node* (simpul), dan *landmark* (penanda)—dapat digunakan untuk memahami bagaimana struktur kota mendukung fungsi dan daya tariknya sebagai pusat perdagangan bebas. Jalur di Batam, seperti jalan utama, pelabuhan, dan bandara, berperan penting dalam menghubungkan kawasan industri, pusat bisnis, dan akses ke luar negeri, sehingga memengaruhi kelancaran mobilitas barang dan tenaga kerja. Tepian, seperti batas maritim dengan Singapura dan Malaysia, menjadi faktor strategis dalam memisahkan kawasan FTZ dari wilayah lainnya, baik secara fisik maupun regulasi, yang berdampak pada kebijakan perdagangan dan investasi. Berbagai kawasan dengan karakteristik spesifik, seperti Kawasan Industri Batamindo, Nongsa Digital Park, dan pusat perdagangan Nagoya,

menunjukkan bagaimana distrik-distrik ini membentuk citra Batam sebagai kota industri, digital, dan komersial. Simpul-simpul utama, seperti Pelabuhan Batu Ampar, Bandara Hang Nadim, dan terminal ferry internasional, berfungsi sebagai titik konektivitas yang mendukung aktivitas ekonomi dan memperkuat Batam sebagai pusat logistik regional. Sementara itu, keberadaan landmark seperti Jembatan Barelang, Masjid Raya Batam, dan kawasan waterfront Marina City memperkuat identitas kota dan berperan dalam menarik wisatawan serta investor. Melalui analisis lima elemen ini, perencana kota dapat memahami bagaimana struktur Batam membentuk persepsi masyarakat dan investor, serta mengoptimalkan pengembangan kawasan FTZ agar lebih fungsional, efisien, dan kompetitif di tingkat global.